

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Gramata Publishing.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2002).

Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pemidanaan*. (Semarang: Pustaka Magister, 2017).

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Ananta, 1994).

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Bunga Rampai, 2002).

Arief, Barda Nawawi. Muladi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: PT. Alumni, 2010).

Diantha, I Made Pasek. Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Golose, Petrus Reinhard I. Deradikalisasi Terorisme. (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014).

Hadari Nawawi dan H.M. Martini Hadari. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1992).

Haerana dan Amir Illyas. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa: Hukum Pidana Materiil dan Formil.

Hamdan, Muhammad. Impementasi Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Gava Media, 1997).

Harris, Joseph P. Introduction to the Law og Nations. (New York: McGraw Hill Series Inc, 1935).

Hiariej. Eddy. O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Huda, Chairul. Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”: Tinjauan

Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.(Jakarta: Kencana, 2006).

J.S. Badudu, dan Sutan Muhammad Zain. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).

Kanter. E.Y. dan Sianturi. S.R. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

Mahmud Mulyadi, dan Feri Antoni Surbakti. Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi. (Jakarta: Softmedia, 2010).

Mardenis. Pemberantasan Terrorism Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia. (Rajawali Press, 2013).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2011).

Mukti Fajar dan Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Muladi. Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. (Jakarta: Habibie Center, 2002).

Muladi dan Dwija Priyanto. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik. (Bandung: PT. Alumni, 2008).

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

Nasution, Aulia Rosa. Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Projodikoro, Wijono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).

Schott, P. A. Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. (Washington DC: World Bank Publication, 2006).

Sjawie Hasbullah F. Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013).

Soedarto. Hukum Pidana I Edisi Revisi. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009).

Soedarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Semarang: Yayasan Sudarto, 1981).

Soedarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. (Bandung: Sinar Baru, 1983).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 2010).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Soemitro, Ronny Hannitjo. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Utrecht. E. Hukum Pidana I. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986).

Wallace, Rebecca. M.M. International Law. (London: Fourth Edition, 2002).

Wilder, Noad. 1962. Webster's New School and Office Dictionary. (New York: The World Publishing Company, 1962).

Wisnubroto, Aloysius. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999).

Wahjdoe, Oentoeng. Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya. (Jakarta: Erlangga, 2011).

B. JURNAL ILMIAH

Badaruddin, Kiagus Ahmad. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Buletin Statistik, Volume 12, Edisi Juni, (2019).

Christian, Laksono Daniel. Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Terorisme Setelah Berlakunya UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Daniel Bodansky and John R. Crook. The ILC's State Responsibility Articles. *The American Journal of International Law*, Volume 96, No. 773, (2008).

Deutsch, Ruthanne M. Suing State Sponsors of Terrorism Under the Foreign Sovereign Immunities Act: Giving Life to the Jurisdictional Grant After *Cicippio-Puleo*. *The International Lawyer*, Volume 38, No. 4, Winter (2004).

Donohue, Laura K. Anti-Terrorist in the United Kingdom and United State. *Michigan Journal of International*, Volume 27, (2006).

Imam Subandi, Adji Samekto. Pengaruh Transaksi Hawala Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3, (Juli 2018).

King, Faisal Sulaiman. Who os The Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme. Yogyakarta: Elmatra-Publishing, (2007).

Kusumah, Mulyana W. Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum. *Kriminologi Indonesia Volume II Nomor 2*, (2002).

Mylonaki, Emmanpuela. The Manipulation of Organized Crime by Terrorist: Legal and Factual Perspective. *International Criminal Law Review*. (2002).

Pujiyono. Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Model Dual Track System

Selective. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP. 2019).

Pearl, Raphael F. CSR Issue Brief for Congress: Terrorism the Future and United State Foreign Policy. (2001).

Ropi, Ismatu. Terorisme: Sebuah Persoalan Definisi dalam Jajang Jaroni dan Jambari Makruf (ed). Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah, (2016).

Sefriani. Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara. Volume 17, Edisi Januari, (2010).

Wilkinson, Paul. State Sponsored International Terrorism: The Problem of Response. The World Royal Institute of International Affairs. Volume 40, No. 7 (Juli 1984).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of the Financing of Terrorism 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang (Undang-Undanng Tindak Pidana Terorisme).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

United States' Justice Againts Sponsors of Terrorism Act (US JASTA)

United State' Foreign State Immunity Act (US FSIA).

Canada's Justice for Victims of Terrorism Act (Canada JVTA).

Canada's State Immunity Act (Kanada SIA).

Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 Tentang Pedoman Identifikasi
Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme
Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

D. WEBSITE

Council on Foreign Relation in Cooperation with the Markel Foundation,
Terrorism: Q & A. The Money: Drying Up the Funds for Terror.

<http://cfren-orism.org/response/money>

Sejarah Beridirinya Terorisme di Dunia

[http://pedomanbengkulu.com/2018/05/sejarah-berdirinya-terorisme-
di-dunia/](http://pedomanbengkulu.com/2018/05/sejarah-berdirinya-terorisme-di-dunia/)

Sofyan, Syafran. "Pentingnya Pancasila Bagi NKRI".

[http://www.lemhannas.go.id/portal/im/component/content/article/177-
artikel-artikel/2008-pentingnya-pancasila-bagi-nkri.html](http://www.lemhannas.go.id/portal/im/component/content/article/177-artikel-artikel/2008-pentingnya-pancasila-bagi-nkri.html).

<http://crimemuseum.org/library/terrorism/originsOfTheTermTerrorisme.html>

[http://republicsg.info/dictionaries/1990 black's-law-dictionary-edition-6.com](http://republicsg.info/dictionaries/1990-black-s-law-dictionary-edition-6.com)

CIA, The War on Terrorism, <https://cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism-fags.html>

FBI, Terrorism Definition, <https://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism-definition>.